

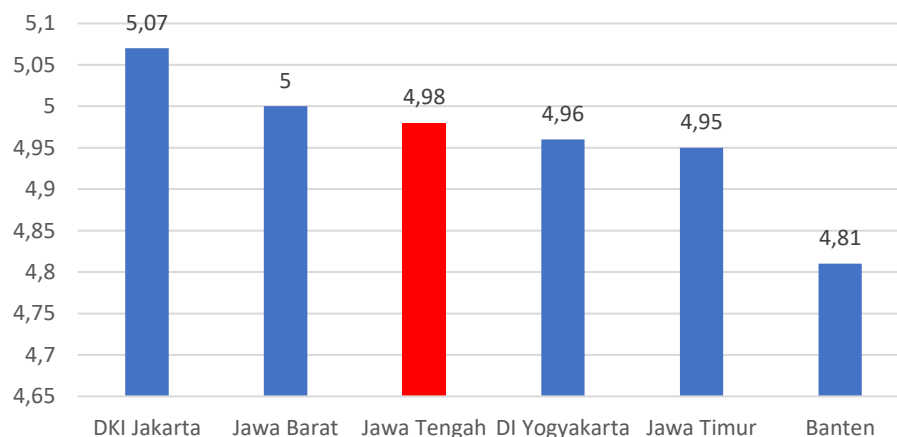
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dalam jangka panjang oleh setiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan (Nugroho, 2014). Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai kriteria untuk mengetahui ketimpangan wilayah suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Yasir, 2023). PDRB merupakan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu dalam periode tertentu (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp25.369 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp24.167 triliun (Provinsi Jawa Tengah, 2024). Provinsi Jawa Tengah merupakan penyumbang pendapatan negara dari Pulau Jawa yang cukup besar dikarenakan kekayaan sumber daya alam dan sektor ekonomi lainnya yang mendukung kemajuan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.



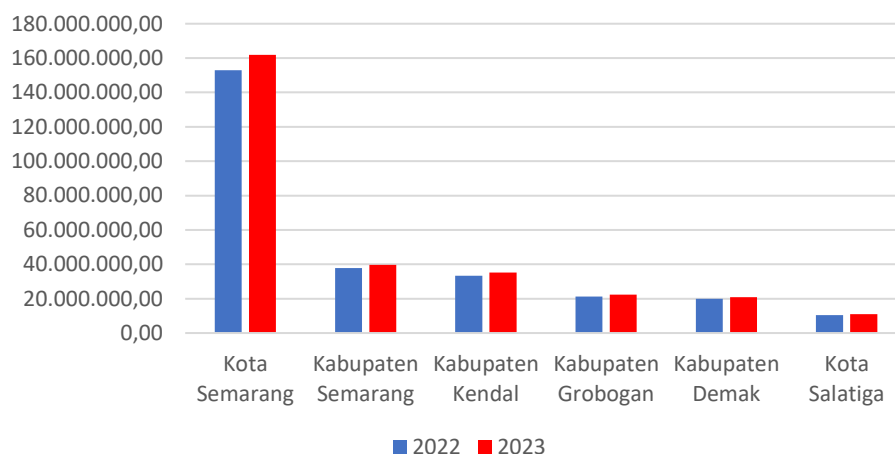
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 1. 1 Laju PDRB Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2023

Laju kenaikan PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu cerminan tingkat kesejahteraan suatu wilayah atau dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Namun

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terjadinya pembangunan yang merata pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

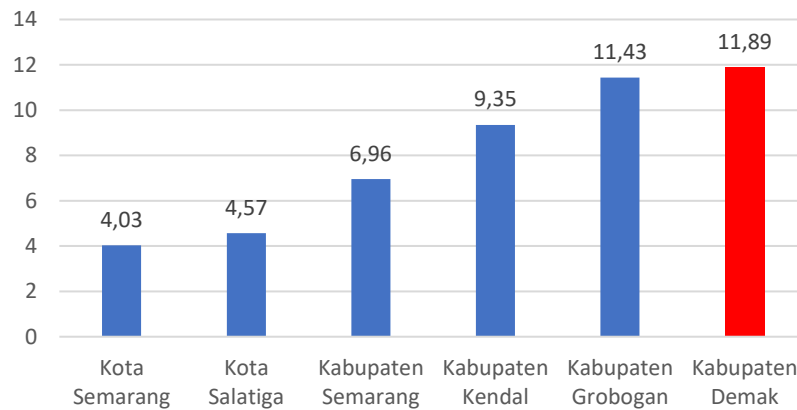
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 merencanakan beberapa wilayah yang akan dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Beberapa wilayah yang dimaksud dinamakan sebagai Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang merupakan kawasan regional dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Selain itu, wilayah pengembangan ini juga direncanakan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sehingga nantinya diharapkan mampu meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan perbandingan nilai PDRB berdasarkan harga konstan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 1. 2 Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan Wilayah Kedungsepur Tahun 2023

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi di Wilayah Pengembangan Kedungsepur belum merata dimana Kabupaten Demak dan Kota Salatiga berada pada posisi yang paling rendah. Nilai PDRB pada tahun 2023 untuk Kabupaten Demak sebesar Rp 20.839.746,27, sementara untuk Kota Salatiga sebesar Rp 10.918.688,78. Ketimpangan kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Tengah juga dapat dilihat melalui tingkat kemiskinannya.



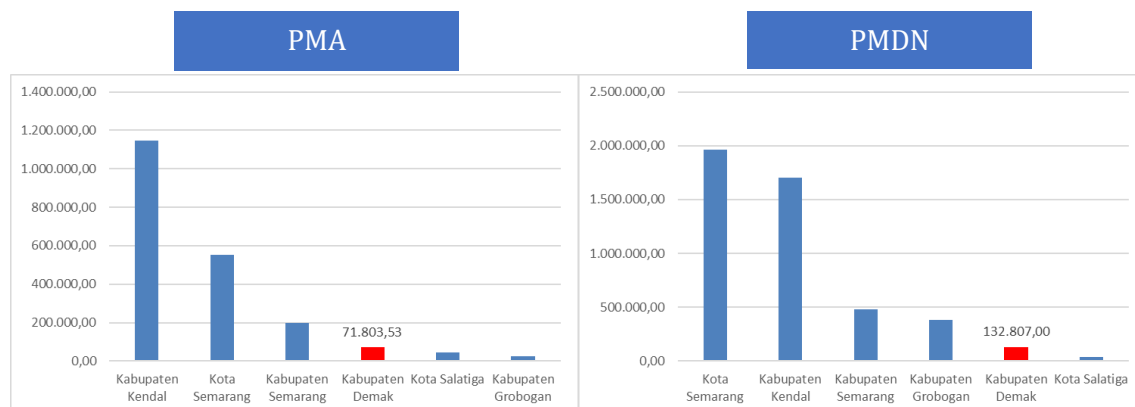
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 1. 3 Grafik Tingkat Kemiskinan (Persen) Wilayah Kedungsepur Tahun 2024

Wilayah Pengembangan Kedungsepur menunjukkan bahwa Kabupaten Demak sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 142.000 jiwa. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1% juga (Ginting & Rasbin, 2010).

Posisi pertumbuhan ekonomi yang masih rendah tentunya membutuhkan dorongan dana dari pihak lainnya. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menciptakan peluang dan realisasi investasi (Manampiring dkk., 2023). Investasi merupakan kendaraan bagi perekonomian di mana semakin tinggi nilai realisasi investasi maka akan menunjukkan lajunya pertumbuhan ekonomi, sementara minimnya investasi yang direalisasikan akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan ekonomi (Sa'dah & Santoso, 2019). Selain itu, semakin tingginya investasi yang masuk juga akan menambah jumlah lapangan pekerjaan sehingga penurunan angka kemiskinan dapat diwujudkan serta tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Peningkatan nilai investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan output dan nilai tambah. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta (Private Investment) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA).



Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 1. 4 Grafik PMA dan PMDN Wilayah Pengembangan Kedungsepur Triwulan I Tahun 2024

Nilai investasi yang dicapai Kabupaten Demak terlihat memiliki posisi yang hampir sama pada Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Nilai investasi luar negeri di Kabupaten Demak diketahui berada pada posisi ke-4, sementara nilai investasi swasta berada pada posisi ke-5 dari 6 kabupaten/kota di Wilayah Pengembangan Kedungsepur. Rendahnya nilai investasi tentu perlu ditingkatkan kembali dengan pengoptimalan potensi pada sektor-sektor unggulan. Sektor unggulan merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif yang cukup tinggi (Azmiral, 2015).

Berdasarkan pertumbuhan ekonominya, (Aziz, 2024) menyebutkan bahwa Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan merupakan tiga kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah yang masih dapat tumbuh dengan pesat. Sektor unggulan di Kabupaten Demak berdasarkan PDRB tahun 2019–2023 adalah industri pengolahan dengan nilai Rp6.265.107,85 pada tahun 2023, yang menyumbang 30,06% dari total PDRB. Sektor unggulan lainnya berdasarkan nilai PDRB ini berupa pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran. Potensi yang dimiliki Kabupaten Demak ini perlu mendapatkan perhatian lebih melalui upaya optimalisasi sektor unggulan agar berdampak terhadap peningkatan angka pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Pelaksanaan optimalisasi pada sektor unggulan ini harus berjalan sesuai dengan tujuan penataan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 yaitu "Mewujudkan Ruang Wilayah Daerah Berbasis Sektor Pertanian dan Industri yang Unggul Didukung Sektor Perdagangan Jasa dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan". Pengoptimalan ini diharapkan

dapat meningkatkan nilai investasi yang sejalan dengan salah satu sasaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 berupa meningkatnya investasi daerah dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 5,65% yang akan dicapai pada tahun 2026. Sasaran ini merupakan salah satu dari hal yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi alasan dilaksanakannya penelitian mengenai “Arahan Pengembangan Lokasi Investasi di Kabupaten Demak”. Penelitian ini dilakukan melalui kajian investasi dari sisi keruangan dimana nantinya akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam bentuk gambaran lokasi yang sesuai untuk ruang investasi.

1.2 Rumusan Permasalahan

Kabupaten Demak termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang direncanakan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Namun nilai PDRB Kabupaten Demak pada tahun 2023 sebesar Rp 20.839.746,27 menunjukkan wilayah ini berada pada posisi ke 2 terendah dibanding kabupaten/kota lainnya yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kedungsepur. Selain itu pada wilayah pengembangan tersebut, Kabupaten Demak juga memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 142.000 jiwa. Jika dilihat dari nilai investasinya, Kabupaten Demak juga masih berada pada posisi rendah, dimana pada Penanaman Modal Asing (PMA), wilayah ini menduduki posisi ke-4, sementara pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menduduki posisi ke-5 dari 6 kabupaten/kota di Wilayah Pengembangan Kedungsepur. Kondisi ini mencerminkan terjadinya ketidakstabilan perekonomian wilayah. Rendahnya nilai investasi tentu perlu ditingkatkan kembali dengan menentukan lokasi yang potensial untuk pengoptimalan nilai investasi pada sektor unggulan yang tercantum dalam tujuan penataan ruang yaitu “Mewujudkan Ruang Wilayah Daerah Berbasis Sektor Pertanian dan Industri yang Unggul Didukung Sektor Perdagangan Jasa dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan”. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian mengenai perencanaan pengembangan wilayah investasi dengan memaksimalkan sektor unggulan yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, penting untuk melakukan kajian mengenai arahan pengembangan lokasi investasi di Kabupaten Demak.

1.3 Tujuan dan Sasaran

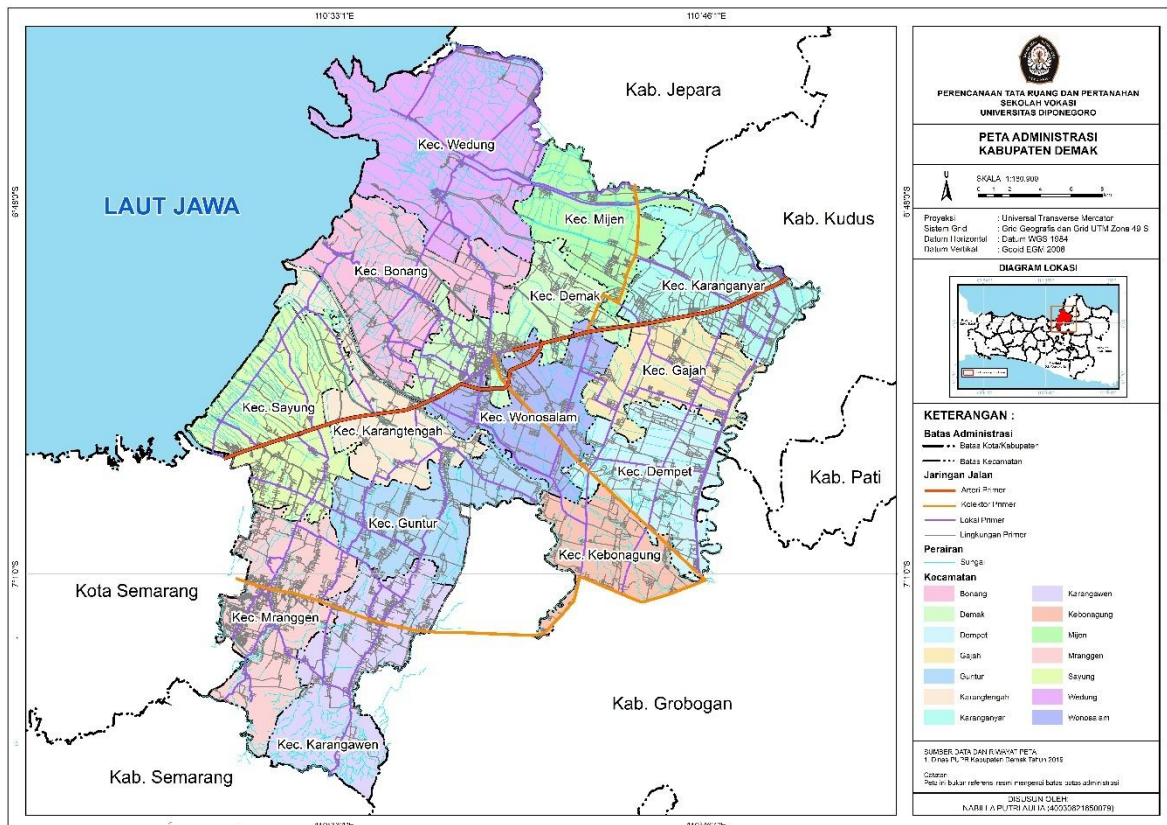
Tujuan penulisan ini adalah untuk menyusun arahan lokasi investasi di Kabupaten Demak. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Menganalisis wilayah peruntukan sektor primer di Kabupaten Demak
2. Menganalisis wilayah peruntukan sektor sekunder di Kabupaten Demak
3. Menganalisis wilayah peruntukan sektor tersier di Kabupaten Demak
4. Menganalisis kemampuan lahan di Kabupaten Demak
5. Menganalisis potensi unggulan daerah di Kabupaten Demak
6. Menganalisis persebaran tenaga kerja di Kabupaten Demak
7. Mengidentifikasi lokasi pengembangan investasi di Kabupaten Demak
8. Mengidentifikasi arahan lokasi investasi di Kabupaten Demak yang sesuai dengan rencana pola ruang

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah membahas mengenai batasan wilayah yang dikaji, alasan pemilihan lokasi dan gambaran singkat termasuk menampilkan dalam bentuk peta.



Sumber: DPUPR Kabupaten Demak, 2019

Gambar 1. 5 Peta Administrasi Kabupaten Demak

Kabupaten Demak memiliki luas wilayah 99.532,35 Ha yang terbagi dalam 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 243 desa. Secara geografis, Kabupaten Demak terletak pada koordinat 6°43'26" - 7°09'43" Lintang Selatan dan 110°27'58" - 110°48'47" Bujur Timur. Kabupaten Demak dengan bentang Barat ke Timur sepanjang 49 km dan bentang Utara ke Selatan sepanjang 41 km. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Demak sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kota Semarang

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perumusan rencana lokasi investasi di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak pastinya memiliki beberapa sektor unggulan yang nantinya dapat dikembangkan agar dapat mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Penelitian ini membahas mengenai beberapa indikator.

1. Analisis Tipologi Pengembangan Sektoral

Analisis tipologi pengembangan sektoral digunakan untuk mengetahui lokasi yang termasuk dalam kategori sektor potensial berkembang, sektor kurang berkembang, serta sektor tidak dapat dikembangkan untuk sektor primer, sekunder, dan tersier.

2. Analisis Lokasi Pengembangan

Analisis lokasi pengembangan digunakan untuk mengetahui lokasi pada Kabupaten Demak yang sangat prospektif/sangat berkembang, prospektif/berkembang, dan kurang prospektif/kurang berkembang untuk dikembangkan sebagai lokasi investasi pada setiap sektor dengan memanfaatkan indikator kemampuan lahan, tenaga kerja, serta pola ruang.

1.5 Tahapan/Proses

Kegiatan penelitian tugas akhir yang dilakukan di Kabupaten Demak memiliki tahapan pelaksanaan penelitian yaitu meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga menghasilkan output berupa rencana lokasi potensial investasi. Tahapan pelaksanaan yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut.

a. Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap lokasi penelitian yaitu menyusun gambaran awal mengenai wilayah studi dalam penelitian yang diperlukan meliputi kondisi fisik, kondisi non fisik, dan konstelasi wilayah. Kemudian melakukan

penentuan rumusan permasalahan yang terjadi pada wilayah studi serta melakukan studi literatur sebagai data dukung mengenai tema yang akan dibahas.

b. Input/Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data mencakup data yang diperlukan dalam melakukan analisis. Pengumpulan data ini dilakukan secara primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari proses wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Data sekunder didapatkan melalui website ataupun data yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait secara langsung.

c. Proses/Analisis Data

Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis spasial skoring dan teknik overlay menggunakan software ArcGIS serta analisis kuantitatif dengan melakukan proyeksi tenaga kerja. Pemetaan pengembangan wilayah investasi ini memanfaatkan informasi mengenai pola ruang dan tutupan lahan untuk mengetahui wilayah tipologi pengembangan sektoral. Selain itu juga dilakukan analisis kemampuan lahan, ketenagakerjaan, dan faktor pengurang investasi untuk mengetahui lokasi yang sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai lokasi investasi sehingga dapat dirumuskan arahan pengembangan lokasi investasi.

d. Ouput yang Dihasilkan

Pada tahapan ini berisikan hasil akhir dari penelitian Tugas Akhir dengan Peta Arahan Pengembangan Lokasi Investasi di Kabupaten Demak yang terfokus pada arahan lokasi yang sangat prospektif untuk dijadikan sebagai lokasi investasi pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang sesuai dengan rencana pola ruang yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

1.6 Metode dan Hasil Akhir

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data sebagai pendukung proses analisis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara. Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

untuk mengetahui penentuan aspek dan pembobotan yang digunakan dalam pertimbangan merumuskan lokasi investasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan berupa data spasial dan data non spasial. Data spasial memiliki format shapefile (.shp) yang kemudian diolah untuk menghasilkan output berupa peta, sementara data non spasial dapat berbentuk angka atau deskripsi yang kemudian dapat diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, atau narasi. Data sekunder ini bersumber dari instansi secara langsung maupun melalui website secara online yang mudah didapatkan pada era globalisasi ini. Kegiatan pengumpulan data ini diawali dengan penyusunan tabel kebutuhan data sebagai acuan dalam proses pengumpulan data nantinya, agar saat terjun ke lapangan, proses penelitian tidak terhambat karena kegiatan pra survei yang belum selesai.

Tabel 1. 1 Kebutuhan Data

No.	Jenis Analisis	Nama Data	Tipe Data	Unit Data	Teknik Pengumpulan	Tahun	Sumber
1.	Analisis Wilayah Peruntukan	Pola Ruang (Kawasan Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan)	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2020	DPUPR Kabupaten Demak
2.	Sektor Primer	Tutupan Lahan (Lahan Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan)	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
3.	Analisis Wilayah Peruntukan	Pola Ruang (Kawasan Peruntukan Industri)	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2020	DPUPR Kabupaten Demak
4.	Sektor Sekunder	Tutupan Lahan (Lahan Industri)	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
5.	Analisis Wilayah Peruntukan Sektor	Pola Ruang (Kawasan Permukiman dan Kawasan Pariwisata)	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2020	DPUPR Kabupaten Demak
6.	Tersier	Tutupan Lahan (Lahan Terbangun)	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak

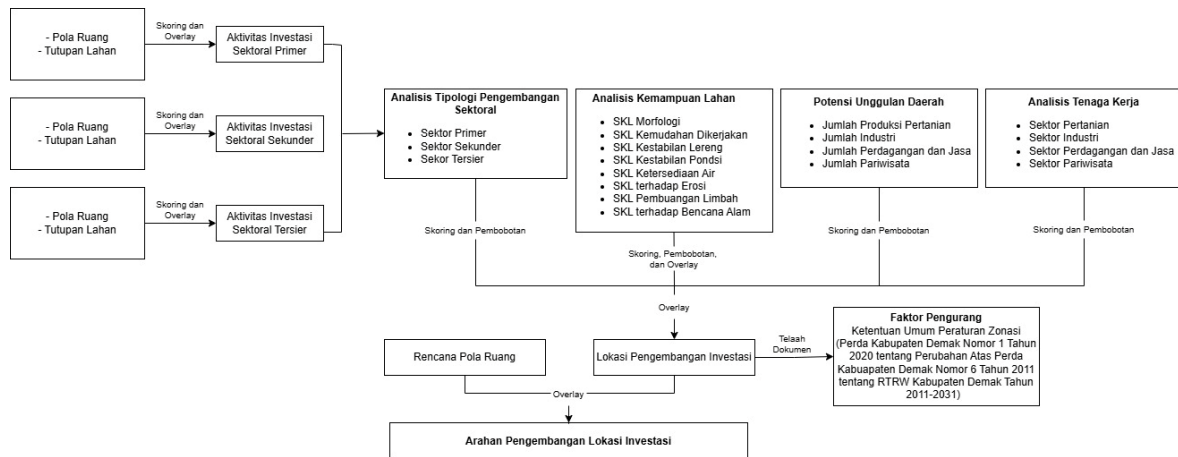
No.	Jenis Analisis	Nama Data	Tipe Data	Unit Data	Teknik Pengumpulan	Tahun	Sumber
		Tempat Tinggal dan Pariwisata)					
7.	Analisis Kemampuan Lahan	Morfologi	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
8.		Kemiringan Lereng	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
9.		Ketinggian	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)/Website	2024	DPUPR Kabupaten Demak/DEM NAS InaGeoportal
10.		Jenis Tanah	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
11.		Daerah Aliran Sungai	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
12.		Curah Hujan	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
13.		Bencana Alam (Rawan Gerakan Tanah dan Gempa Bumi)	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)/Website	2024	BPBD Kabupaten Demak/PVM BG Kementerian ESDM
14.		Tutupan Lahan	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
15.	Analisis Persebaran Tenaga Kerja	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	Numerik	Kecamatan	Sekunder (Permohonan Data)	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak
16.	Kebijakan Pemerintah	Pola Ruang	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2020	DPUPR Kabupaten Demak

No.	Jenis Analisis	Nama Data	Tipe Data	Unit Data	Teknik Pengumpulan	Tahun	Sumber
17.		KP2B (LCP2B & LP2B)	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2020	DPUPR Kabupaten Demak
18.		LSD	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
19.	Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Produksi Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Numerik	Kabupaten	Sekunder (Telaah Dokumen)	2024	Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak
20.		Lokasi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Digitasi)	2024	Google Earth
21.		Lokasi Industri	Deskripsi	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	20254	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak
22.		Lokasi Perdagangan dan Jasa	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak
23.		Lokasi Pariwisata	Spasial	Kabupaten	Sekunder (Permohonan Data)	2019	DPUPR Kabupaten Demak

Sumber: Penulis, 2025

1.6.2 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial dan analisis deskriptif. Kedua metode analisis tersebut dapat menunjang data temuan yang hendak diteliti agar dapat menghasilkan analisis secara lebih mendalam terhadap arahan sektor investasi di Kabupaten Demak.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 1. 6 Kerangka Analisis

1. Metode Analisis Spasial

Metode spasial digunakan untuk mengetahui informasi mengenai gambaran sebaran dan luasan klasifikasi tipologi pengembangan sektor primer, tipologi pengembangan sektor sekunder, tipologi pengembangan sektor tersier, satuan kemampuan lahan, kemampuan lahan, potensi unggulan daerah, serta sebaran tenaga kerja. Metode ini dapat mempermudah penentuan lokasi yang menjadi potensi untuk investasi dengan berbagai macam penggunaan parameter/bahan dalam menganalisis sehingga dapat diketahui arahan pengembangan lokasi investasi. Pengolahan dari metode ini menggunakan sistem informasi geografis (SIG) pada *software* ArcGIS 10.8 dengan berbagai *tools* yang dapat menunjang. Data yang dibutuhkan untuk pengolahan dengan metode spasial ini menggunakan peta berbentuk raster (.tif) maupun vektor (.shp). Berikut merupakan jenis analisis yang digunakan dalam metode analisis spasial.

a. Skoring

Metode skoring merupakan suatu metode pemberian nilai terhadap masing - masing parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Sholahuddin, 2015). Pengolahan skoring menggunakan sistem informasi geografis (SIG) pada *software* ArcGIS 10.8. Skoring pada setiap analisis berbeda. Pada analisis satuan kemampuan lahan dan kemampuan lahan, pemberian skoring didasarkan pada pedoman yang ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Sementara proses skoring pada analisis tipologi sektoral, persebaran tenaga kerja, dan lokasi pengembangan menggunakan *tools classification* dengan metode natural break (jens) yang diklasifikasikan menjadi 3 kelas (skor 1, skor 2, skor 3). Proses skoring

pada data awal (pola ruang dan tutupan lahan), yaitu kawasan budidaya yang sesuai untuk pengembangan sektor tertentu diberi skor (3), kawasan budidaya lainnya yang tidak sesuai dengan sektor yang akan dikembangkan diberi skor (2), serta kawasan lindung diberi skor (1). Proses skoring pada analisis tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa klasifikasi perwilayahan penanaman modal dijadikan 3 kelas yaitu maju, berkembang, dan tertinggal. Selain itu, penelitian (Dwiputra dkk., 2016) menyebutkan bahwa semakin banyak kelas maka nilai keakuratan semakin rendah. Oleh karena itu, pengelompokan menjadi 3 kelas akan mempermudah pemahaman mengenai lokasi pengembangan investasi kepada investor. Investor dapat dengan cepat mengidentifikasi wilayah mana yang layak untuk dikembangkan tanpa harus membedakan antara kelas menengah yang berdekatan, seperti “cukup prospektif”.

b. Pembobotan

Metode pembobotan merupakan suatu metode yang digunakan apabila setiap karakter memiliki peranan berbeda atau tingkat pengaruh yang berbeda (Sholahuddin, 2015). Pembobotan pada setiap analisis berbeda. Pada analisis satuan kemampuan lahan dan kemampuan lahan, pemberian pembobotan didasarkan pada pedoman yang ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Sementara proses pembobotan pada analisis lokasi pengembangan investasi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa pengembangan sektor-sektor strategis penanaman modal sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah sehingga indikator kemampuan lahan dan potensi unggulan harus dijadikan sebagai faktor utama. Sementara indikator lainnya seperti pola ruang harus ditambahkan untuk melihat kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang serta indikator tenaga kerja ditambahkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyerap tenaga kerja berdasarkan hasil wawancara.

c. Overlay/Tumpang Tindih

Metode overlay merupakan proses menyatukan beberapa set data yang saling bertampalan dengan tema yang berbeda untuk tujuan identifikasi hubungan antar data tersebut (Syahputra dkk., 2023). Pengolahan *overlay* menggunakan sistem

informasi geografis (SIG) pada *software* ArcGIS 10.8. Proses yang dilakukan berupa penggabungan dari beberapa data spasial dengan *tools* “*Intersect*” yang ada pada menu *geoprocessing*. Analisis yang menggunakan teknik ini ada pada tipologi sektoral, kemampuan lahan, dan lokasi pengembangan investasi.

2. Metode Analisis Deskriptif

Metode deskriptif yang digunakan berupa kumpulan data mengenai angka dan deskripsi. Metode ini memberikan informasi yang mendukung pengolahan spasial. Data angka tertuang pada luasan setiap analisis, sementara data deskripsi menghasilkan luaran berupa arahan sektor investasi.

1.6.3 Hasil Akhir

Luaran tugas akhir yang dihasilkan disesuaikan dengan program studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan berupa prototipe, prosedur, rencana yang berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tugas akhir “Arahan Pengembangan Lokasi Investasi di Kabupaten Demak”, luaran yang dihasilkan berupa arahan spasial dalam penentuan lokasi potensial investasi pada sektor unggulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Demak untuk bisa meningkatkan nilai investasi yang menjadi salah satu aspek pada peningkatan nilai PDRB sehingga nantinya juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arahan tersebut nantinya akan diajukan dalam bentuk peta sebagai HKI (Hak Kekayaan Intelektual) penulis.